

DESENTRALISASI DAN MONOISME MASYARAKAT (PRAKTEK ELIT LOKAL MELANGGEMKAN DOMINASI)

Firman

Staf Pengajar FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: firman@uta45jakarta.ac.id

Abstract

This study on decentralization and the birth of new monoism in the structure of society in South Sulawesi. Praktek domination of power is practiced with the ways of politicization of democracy. Convenience of community monoism as if can not be unstoppable with the existing regulations. Perlu there is a policy and regulation for community monoism practice is not takes place in a massive and beneficial manner only to certain groups. The indication of the management of a region that eludes a group of elites makes the circulation of power increasingly difficult.

Keywords: *Decentralization, Community Monoism, ElitLokal*

Abstrak

Kajian ini tentang desentralisasi dan lahirnya monoisme baru dalam struktur masyarakat di Sulawesi Selatan. Praktek dominasi kekuasaan dipraktekkan dengan cara-cara politisasi demokrasi. Keberlangsungan monoisme masyarakat seolah-olah tidak dapat terbendung dengan regulasi yang ada. Perlu ada kebijakan dan regulasi agar praktek monoisme masyarakat tidak berlangsung secara massif dan hanya menguntungkan pada kelompok-kelompok tertentu. Indikasi pengelolaan daerah yang terkelolanya sekelompok elit membentuk sirkulasi kekuasaan semakin sulit.

Kata kunci : *Desentraliasi, Monoisme Masyarakat, ElitLokal*

A. Pendahuluan

Politik Indonesia merupakan satu kajian yang menarik karena banyak hal yang terjadi dalam praktek perpolitikan di Indonesia, tidak pernah diduga dalam teori sebelumnya. Salah satu hal menarik dari kajian politik Indonesia adalah adanya monoisme masyarakat, padahal Indonesia jelas dikenal luas sebagai negara plural yang memiliki puluhan suku bangsa.

Monoisme dalam masyarakat yang plural menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana bisa ada “konsolidasi” sempurna di tengah perbedaan yang jelas-jelas ada. Hipotesis yang cenderung skeptis muncul, yakni adanya dominasi elit tertentu dalam perpolitikan lokal di Indonesia. Walaupun belum terbukti, namun sangat dimungkinkan hal serupa bisa terjadi di negara (pusat).

Kali ini akan mencoba mengupas monoisme masyarakat di Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara oligarki politik dimana elit lokal membangun dinasti politik untuk mengakali prosesi demokrasi demi melanggengkan kuasa dan dominasinya. Kajian ini menarik, mengingat elit lokal dengan cerdasnya telah menemukan cara untuk mengelabui demokrasi yang pada saat ini masih dianggap sebagai akomodasi terbaik bagi konsolidasi masyarakat plural.

B. Monoisme Masyarakat

Pasca reformasi yang menyeruak di segala sendi kehidupan bernegara Indonesia pada tahun 1998, konsep pembagian kekuasaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah pun menentukan bentuk barunya. Desentralisasi dan otonomi daerah diperkuat dengan harapan agar distribusi kesejahteraan dapat lebih merata bagi masyarakat di daerah. Upaya distribusi kesejahteraan itu dilakukan dengan mendekatkan pemegang kekuasaan (pemerintah) kepada rakyat, sehingga sesuai dengan pendapat kaum positivis yang menyatakan bahwa tujuan desentralisasi lebih menekankan pada aspek delegasi kewenangan dan/atau urusan teknis-teknis pemerintahan (Syarif Hidayat : 2006).

Desentralisasi dilakukan di semua pemerintahan daerah yang mencakup 33 propinsi dan lebih dari 350 kabupaten/ kota. Dalam aspek politik, desentralisasi diakomodasi bentuk demokratisasi pemerintahan di level daerah. Dengan penerapan demokratisasi hingga ke level daerah, maka ratusan kabupaten/ kota beserta 33 propinsi tersebut harus melaksanakan pilkada. Demokrasi dalam bentuk pilkada ini penting bagi kehidupan berbangsa untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang telah disepakati bersama di level daerah. Hanya saja, sebagian besar orang masih salah kaprah mengartikan demokrasi sebagai tujuan yang harus dicapai. Padahal sejatinya demokrasi adalah sarana untuk meraih tujuan negara. Francis Fukuyama mengatakan “*The mistake made by most people is considering democracy as a destination. Whereas democracy is actually a process, a journey, not a final destination*”. Yang perlu diperhatikan adalah demokrasi melalui partai politik tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meraih tujuan negara lainnya.

Kesalahan pada penerimaan model demokrasi yang hanya sebatas formalitas mengemukakan banyaknya penyimpangan terselubung yang sejatinya telah mencederai demokrasi. Salah satu penyimpangan demokrasi tersebut, yang juga banyak terjadi di tingkat demokrasi lokal di Indonesia adalah monoisme masyarakat. Meminjam kontradiksi dengan pluralisme masyarakat, maka yang dimaksud dengan monoisme adalah adanya kesamaan dalam masyarakat. Kesamaan yang dimaksudkan jaminan adanya konsensus bersama. Lebih dalam, monoisme masyarakat justru mengindikasikan adanya kondisionalitas yang mengancam demokrasi.

Dengan model yang lebih mengecoh daripada monoisme negara yang jelas-jelas dengan kekuasaannya memangkas perbedaan dan cenderung otoriter, monoisme masyarakat berada dalam bingkai demokrasi secara formal sangat dimungkinkan, namun jelas hal ini akan menghilangkan substansi demokrasi karena menutup aspirasi perbedaan yang pasti ada di masyarakat.

Monoisme masyarakat dapat diindikasikan dengan adanya satu peran besar yang dilakukan oleh komunitas tertentu di dalam masyarakat yang plural. Misalnya terjadi dominasi suku, agama, atau entitas tertentu atas komunitas yang plural. Dalam konteks demokrasi, perbedaan seharusnya dikelola, dan bukan dihilangkan. Sebaliknya, monoisme masyarakat menghilangkan perbedaan yang ada secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan yang dilakukan atas kuasa satu kelompok/ pihak tertentu.

Kontekstualisasi monoisme masyarakat dalam mendekonstruksi demokrasi substantif di Indonesia tergambar dalam kajian Willy Purna Samadhi dan Sofian Munawar Asgart (2009) yang menyatakan bahwa dari beberapa indikasi kemunduran demokrasi, diantaranya *political practise remain elite-dominated* dan *politicisation of issues and interests, organisations, and political mobilisations are top-down driven and characterised by clientelism and populism*. Pada poin pertama, didapatkan kenyataan bahwa dominasi elit politik masih terlihat sehingga akomodasi perbedaan di masyarakat sulit untuk dikedepankan. Sulitnya akomodasi perbedaan di masyarakat tersebut merupakan salah satu indikasi terjadinya monoisme masyarakat yang menegasikan perbedaan-perbedaan yang secara alamiah muncul di masyarakat.

Pada poin kedua, isu dan kepentingan politik, organisasi politik, serta mobilisasi politik yang dikuasai dan diatur sedemikian rupa oleh budaya patron klien yang marak terjadi di Indonesia. Kondisi ini juga mengindikasikan adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat yang tidak diakomodasi dan cenderung diendapkan oleh elit yang mendominasi dan menggerakkan isu dan kepentingan politik melalui organisasi politik. Lebih lanjut, mereka (elit) justru kerap menggunakan masyarakat dalam mobilisasi kepentingan politik mereka.

Cerdasnya cara kerja elit dominan ini dijelaskan lebih lanjut dalam riset A.E Priyono dan Nur Iman Subono mengenai Demokrasi Oligarki (2009). Dalam riset yang mendalami mengenai kolonisasi instrumen demokrasi oleh dominasi elit tersebut, dikatakan bahwa elit yang mendominasi politik turut beradaptasi

dengan demokrasi yang menjadi pilihan sistem pada saat ini. Adaptasi elit dalam sistem demokrasi dilakukan tentu untuk melanggengkan kekuasaan dan dominasinya. Jika dalam sistem otoritarian, elit dapat dengan mudah melanggengkan kekuasaan karena secara terang-terangan menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain, maka dalam sistem demokrasi, perlu dipikirkan cara yang lebih “elegan” bagi elit untuk melanggengkan dominasinya, tentu dengan cara yang demokratis. Salah satu cara yang digunakan oleh elit untuk beradaptasi dengan sistem demokrasi sehingga secara formal mereka tidak melakukan “pelanggaran” dalam melanggengkan dominasinya adalah dengan membentuk apa yang disebut dengan Oligarki Demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, kebhinnekaan menjadi satu corak tersendiri yang menjadikan kemunculan perbedaan sebagai suatu hal yang lumrah. Oleh karena itu, pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (plural). Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika seringkali disalahartikan menjadi upaya membuat masyarakat yang tunggal (mono). Franz Magnis Suseno (2001) mengatakan bahwa upaya membuat masyarakat Indonesia monolit adalah sama dengan mematikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sikap yang tepat dalam mengelola perbedaan tersebut adalah memungkinkan akomodasi perbedaan. Franz Magnis Suseno menawarkan ide untuk menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung internalisasi paradigma kemanusiaan universal oleh masyarakat. Demokrasi dan keadilan sosial menjadi pengejawantahan tawaran ide tersebut.

Namun demikian, dihadapkan pada elit yang cerdas, kondisi ini malah menjadi lingkaran setan ketika elit membentuk dinasti politik dalam oligarki demokrasi nya yang kemudian mengkonsolidasikan masyarakat untuk menjadi mono. Dengan demikian, seharusnya demokrasi tidak dianggap selesai pada definisi atau sistem yang ada sekarang, seperti kata Frank Cunningham (2002) bahwa *coexistence of a theory of democracy in the mind of its founder with slavery or sexist exclusion could be taken as evidence that the theory is deeply*

flawed, perlu dilakukan improvisasi untuk mencegah adaptasi elit yang ingin selalu melanggengkan kekuasaan dan dominasinya.

C. Elit Lokal : Berkah Otonomi Daerah?

Otonomi daerah telah berjalan lebih dari satu dasawarsa, kepemimpinan politik pun sudah berpindah atau terdistribusikan dari pusat menuju daerah, Banyak pihak yang berharap bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang besar kepada kabupaten dan kota akan mampu mendorong percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam bingkai demokrasi substansial, namun sampai saat ini berjalannya otonomi daerah justru dipertanyakan. Banyak pihak mempertanyakan efek dari otonomi daerah apakah betul lahirnya otonomi daerah memang bertujuan memsejahterakan masyarakat atau otonomi daerah justru hanya memindahkan kekuasaan elit ditingkat pusat ke raja-raja kecil didaerah.

Fenomena yang nampak sekarang lebih bisa dikatakan bahwa otonomi daerah belum mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, Hadirnya penguasa-penguasa baru di daerah yang seharusnya hanya menjadi alat atau sarana untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan justru malah menjadi tujuan.

Elit lokal mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mendorong demokratisasi di tingkat lokal. sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran dan memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat yang lebih luas. Peran yang signifikan tersebut dikarenakan elit lokal merupakan orang perorangan atau aliansi dari orang yang dinilai pintar dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial yang relatif tinggi dibanding masyarakat umum.

Mosca (1939) menyebutkan beberapa prinsip-prinsip umum yang terkait dengan elit. *Pertama*, adanya kekuasaan politik. *Kedua*, secara umum masyarakat

dikelompokkan kedalam dua kelompok, yang berkuasa dan yang dikuasai. *Ketiga*, elit bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok. *Keempat*, elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya. *Kelima*, elit bersifat otonom.

Elit tidak selamanya memegang tampuk kekuasaan secara legal formal. Sangat dimungkinkan munculnya lebih dari satu elit lokal di suatu wilayah, dan tentunya tidak semua elit tersebut akan memerintah. Kemajemukan kelompok-kelompok elit dalam masyarakat modern menjadikan persaingan yang ketat antar elit untuk berebut menjadi elit yang berkuasa secara formal. Dalam perjalanan politik di Indonesia, khususnya di daerah, kebanyakan elit lokal ingin menjadi elit yang memerintah dibandingkan hanya sekedar menjadi elit yang tidak memerintah. Pilkada secara langsung menjadi momentum bagi para elit yang tidak memerintah secara formal berjuang atau berusaha menjadi elit yang memerintah secara formal melalui pilkada.

Kompetisi yang sangat ketat mengharuskan para elit yang bersaing untuk merumuskan sebuah strategi atau cara agar kekuasaan dapat di raih dan ketika elit telah menduduki tampuk kekuasaan secara legal formal, maka mereka cenderung mencari strategi untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu yang paling sering dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan di tengah deru demokratisasi adalah dengan membuat dinasti politik dengan model oligarki.

D. Oligarki Demokrasi sebagai Upaya Elit Lokal Membuat Monoisme Masyarakat

Oligarki dalam demokrasi bisa dikatakan sebagai monopoli politik bersama, dan menafikan kelompok lain yang menjadi pesaing kelompok tersebut. Oligarki muncul tatkala antar elit saling mendukung satu sama lain dalam proteksi eksistensi mereka dari kehadiran pemain politik baru. Oligarki bisa dilakukan dengan ekspansi jaringan politik, sosial, kultural, ekonomi, ataupun edukasi.

Oligarki sepertinya telah menjadi keniscayaan dalam perjalanan politik Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa oligarki politik di Indonesia sudah terjadi semenjak kepemimpinan presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang merupakan ambisi Soekarno supaya kekuasaannya langgeng ditopang oleh empat kekuatan besar pada saat itu yang mampu dirangkul Soekarno, yaitu kalangan nasionalis, komunis, Islam dan tentara.

Pada zaman orde baru oligarki politik dengan tampilnya Soeharto yang didukung oleh militer. Oligarki pada masa ini lebih bersifat monopolitik yang terwujud dalam asimilasi antara Golkar, ABRI, dan birokrasi. Pasca runtuhnya orde baru dan dengan diberlakukannya otonomi daerah, oligarki politik tidak serta merta hilang. Malahan, oligarki politik menjadi warisan yang dibawa ke pemerintahan daerah. Kondisi Indonesia yang paternalistik dan kesukuan membentuk Oligarki politik di daerah lebih berdasarkan pada keturunan.

Elit lokal yang berasal dari satu suku tertentu, terlebih yang berkuasa secara formal akan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Cara yang dipakai agar kekuasaan nya tetap langgeng adalah dengan menempatkan anggota dari keluarganya untuk menjabat pada jabatan politis yang strategis semisal ketua partai, pembesar organisasi kemasyarakatan, anggota atau ketua DPRD, kepala dinas atau kepala instansi pemerintahan. Selain bertujuan agar pemerintahanya *legitimate*, hal ini juga sebagai upaya membangun jaringan jabatan pada tataran *grassroot* (organisasi kemasyarakatan) yang dapat digunakan sebagai mesin politik pada saat pilkada. Secara formal, hal ini akan menjustifikasi bahwa kekuasaan mereka adalah bukan nepotisme tapi kekuasaan atas kehendak rakyat.

Penguasaan jabatan strategis baik itu yang bersifat politis ataupun tidak oleh satu keluarga atau keturunan merupakan pilihan cara yang paling aman membangun benteng mempertahankan kekuasaan agar tidak jatuh kepada orang lain yang diluar keluarganya. Fenomena yang tersebut diatas inilah yang disebut

dengan dinasti politik. Seorang elit lokal yang ingin mempertahankan kekuasaan di daerahnya, pembangunan dinasti politik harga mati menjadi pilihannya.

Contoh Pembangunan oligarki demokrasi dalam upaya monoisme masyarakat dapat dilihat di Sulawesi Selatan. Keluarga besar Syahrul Yasin Limpo (SYL) menduduki berbagai jabatan formal maupun non formal yang memosisikan mereka sebagai elit lokal yang berpengaruh untuk menciptakan monoisme politik masyarakat Sulawesi Selatan pada saat ini.

a. Syahrul Yasin Limpo

Sulawesi Selatan adalah satu provinsi yang cukup terkenal secara politik, sekaligus kaya akan budaya. Terdapat setidaknya dua suku besar di Sulawesi Selatan, yakni Bugis yang mendominasi wilayah selatan serta Makassar yang mendominasi wilayah utara. Pertarungan antara dua suku tersebut selalu muncul dalam pertarungan politik di Sulawesi Selatan. Dalam kasus pilkada gubernur, jika yang memimpin adalah suku Bugis, maka prioritas pembangunan berada di wilayah selatan. Sebaliknya, jika yang memimpin adalah suku Makassar, maka prioritas pembangunan berada di wilayah utara.

Teori yang dibangun Weber mengenai otoritas dan dominasi telah dimiliki oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam mendominasi legitimasi elit. Melalui modal tersebut, SYL mampu membangun dinasti politiknya di Sulawesi Selatan dengan keterlibatan hampir seluruh keluarganya pada ranah politik dan pemerintahan. Meskipun tidak berasal dari golongan bangsawan tapi SYL mampu menjadi patron. Begitupun dengan modal tradisi dia mampu jadi tokoh adat di Sulawesi Selatan karena kemampuan untuk melanjutkan tradisi dan sangat menghargai adat dan tradisi yang telah terbangun selama ini. Dalam hal legal formal atau rasional, kemampuan Syahrul Yasin Limpo dalam kepemimpinan bisa diuji dari kapasitas kepemimpinan serta jejak karir birokrasi yang di mulai ketika ia menjadi lurah, camat, bupati, wakil Gubernur hingga jadi Gubernur di Sulawesi Selatan.

Modal yang sangat mendasar sehingga SYL mampu membangun modal sosial adalah kemampuannya dalam wilayah kultur. Khususnya di bagian utara Sulawesi Selatan. SYL mampu membangun kepercayaan masyarakat sebagai sosok pemimpin yang kharismatik sehingga kepemimpinan yang melekat dalam dirinya membuat masyarakat tunduk dan patuh apa yang disampaikan. Padahal dari segi ekonomi SYL tidak mempunyai aset yang cukup besar. Hal ini menjadi kritik atas besarnya keyakinan banyak pihak bahwa modal ekonomi sangat berpengaruh untuk melanggengkan legitimasi dan dominasi pada masyarakat.

SYL telah mendapatkan legitimasi dari dua hal yang sangat penting yaitu dominasi kharismatik dan dominasi tradisional. Satu hal yang tidak kalah penting adalah adanya dominasi legal formal atau legal rasional. SYL dalam dominasi legal formal telah di dapatkan dengan kemampuan kepemimpinannya di beberapa level birokrasi sampai SYL merebut kekuasaan tertinggi di Sulawesi Selatan. Dengan keberhasilan itu maka keluarga Yasin Limpo telah memiliki ruang yang lebih luas dalam melakukan dominasi pada masyarakat. Pilkada Gubernur mendatang akan semakin memperjelas dominasi SYL di Sulawesi Selatan karena hampir semua kekuatan politik dan kekuatan masyarakat didominasi oleh keluarga SYL.

b. *Another Limpo*

Aktifitas keluarga Yasin Limpo di panggung politik Sulawesi Selatan diawali dengan keterlibatan Yasin sebagai pendiri partai Golkar Sulawesi Selatan. Selain itu Yasin juga pernah menjabat sebagai Bupati Gowa, Bupati Luwuk, Bupati Majene, dan Bupati Maros. Istrinya, Nurhayati Yasin Limpo juga meraih kemenangan mewakili Partai Golkar di DPR-RI dalam pemilu legislatif 2004.

Aktifitas ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, SYL yang memenangkan pertarungan Pilkada Sulawesi Selatan pada tahun 2007. SYL sebelumnya pernah menapaki jalan birokrat karir sebagai lurah, camat, bupati, wakil gubernur

Sulawesi Selatan, dan juga ketua beberapa ormas di Sulawesi Selatan hingga akhirnya melangkah ke posisi orang nomor satu di Sulawesi Selatan. Kemampuan Yasin Limpo tidak hanya diteruskan oleh SYL, beberapa putra-putrinya dan cucunya juga terlibat aktif dalam beberapa ormas besar di Sulawesi Selatan.

Ichsan Yasin Limpo yang pada Pilkada 2005 dan 2010 terpilih menjadi Bupati Gowa juga aktif di FKPPi Sulawesi Selatan. Tenri Olle Yasin Limpo adalah ketua DPRD Gowa yang juga ketua Golkar Gowa. Dewie Yasin Limpo menjabat sebagai ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan dan pada tahun 2008 mengajukan diri dalam Pilkada Kabupaten Takalar. Haris Yasin Limpo aktif di KNPI Sulsel, ketua tarbiyah Islamiyah Sulawesi Selatan, dan juga duduk di kursi DPRD Kota Makassar. Sedangkan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo juga menjabat ketua harian karang taruna Indonesia Sulawesi Selatan dan ketua FKPPi Kota Makassar. Putra dari Ichsan Yasin Limpo, Adnan Purichta Ikhsan duduk di DPRD Sulsel mewakili Partai Demokrat dan Tita Yasin Limpo, Putri Syahrul Yasi Limpo meraih kemenangan mewakili PAN di DPR-RI.

Dari gambaran diatas, dinasti keluarga Yasin Limpo mampu memperluas pengaruhnya ke berbagai bidang, seperti di berbagai partai politik, organisasi kemasyarakatan, sampai mampu masuk kedalam posisi strategis dalam pemerintahan. Keluarga ini tampaknya sedang menata dan menyusun strategi untuk membangun kokohnya dinasti politik keluarga dalam lingkup politik lokal maupun politik nasional.

Jika dilihat dari beberapa alasan diatas, maka partai politik dan organisasi kemasyarakatan, mereka jadikan kendaraan untuk menuju dinasti politik. Karena sistem kekerabatan seperti ini adalah perwujudan dari adanya keinginan melanggengkan dominasi dan hegemoni kuasa dalam partai politik. Tokoh baru dipromosikan untuk menggantikan dan mengandalikan jaringan politik yang dimiliki.

E. Kesimpulan dan Penutup

Monoisme masyarakat yang digambarkan dengan usaha keluarga Yasin Limpo mendominasi politik Sulawesi Selatan telah melenakan prosesi demokrasi dari hal yang lebih substantif, yakni akomodasi perbedaan. Monoisme di sebuah masyarakat yang plural tentu menjadi satu fenomena menarik dan patut dipertanyakan keberadaannya yang ternyata justru dilanggengkan oleh prosesi demokrasi. Apakah berarti demokrasi di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan hanya puas dengan telah dilakukannya pemilihan secara langsung dan melupakan substansi demokrasi yang sesungguhnya.

Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa dan seluruh stakeholder bangsa ini agar cita-cita system demokrasi yang mensejahterakan dapat diwujudkan. Perjalan bangsa ini khususnya dalam masa reformasi meninysahkan berbagai persoalan baru yang terus menggeliat seperti fenomena monoisme masyarakat yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- A.E Priyono dan Nur Iman Subono. *Oligarchic Democracy; Colonisation of the Instrument of Democracy by the Dominant Elite*. 2009. Yogyakarta : PCD Press.
- Frank Cunningham. *Theories of democracy; a critical introduction*. 2002. London : Routledge.
- Franz Magnis Suseno. *Kuasa dan Moral*. (Cetakan Kelima) 2001. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gaetano Mosca. *The Ruling Class*. 1939. New York : McGraw Hill Book Company, Inc.
- Siti Zuhro, dkk. *Local Democracy and Bureaucratic reform*. 2007. Jurnal. Jakarta : The Habibie Center.
- Supriyono, Bambang. 2018. *BahanAjar Mata KuliahSistemAdmnistrasiPemeirntahanLokal*. S3 FIA
- Syarif Hidayat. *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah*, dalam Jurnal Jentera edisi 14 tahun IV Oktober-Desember 2006. Jakarta : PSHK.
- Willy Purna Samadhi dan Sofian Munawar Asgart. *Building Democracy on the Sand*. 2009. Yogyakarta : PCD Press.